

Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Pada Dinas Pemadam Kebakaran  
Dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan

<sup>1</sup>Adelini Siagian, <sup>2</sup>Saparuddin

<sup>1,2</sup>Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri  
Sumatera Utara Medan

Email: [adelinisiagian@gmail.com](mailto:adelinisiagian@gmail.com), [saparuddin.siregar@uinsu.ac.id](mailto:saparuddin.siregar@uinsu.ac.id)

Corresponding Mail Author : [adelinisiagian@gmail.com](mailto:adelinisiagian@gmail.com)

---

**Abstract :** *The realization of good government in each region requires transparency and openness from the public sector so that the public can control and improve the performance of local governments. This paradigm gives the government the widest possible autonomy but must be balanced with proper regional financial management. APBD stands for “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” in Indonesian, which translates to “Regional Government Budget” in English. APBD is a strategic agenda in improving people’s welfare. Not all regions succeed in functioning the APBD properly. The aim of the study was to find out whether the Padangsidempuan City Fire and Rescue Service had properly recorded or not (according to Permendagri No. 13 of 2006 and PP No. 24 of 2005 concerning Regional Financial Management) as a reference. The research methodology in the author’s research is a qualitative research design that aims to understand the data obtained in the form of notes and financial reports. The types of data used are primary data and secondary data and the data obtained, namely by field research data collection techniques and library research.*

**Keywords :** *Analysis, Finance, Recording, Reporting, the Padangsidempuan City Fire and Rescue Service.*

---

## I. Pendahuluan

Pencatatan dan pelaporan keuangan merupakan komponen yang penting dalam menjalankan suatu organisasi. Melalui pencatatan dan pelaporan, akan tergambar jelas aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi. Pemerintahan sebagai organisasi publik juga memiliki kewajiban untuk melaporkan aktivitas yang terjadi di pemerintahan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan ini akan menggambarkan bagaimana pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakatnya melalui pembangunan sarana dan prasarana yang akan dinikmati oleh masyarakat secara nyata. Masyarakat dalam hal ini dituntut ikut ambil bagian untuk mengawasi kinerja pemerintahan.

Indonesia di tengah dinamika perkembangan global maupun nasional, saat ini menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian serius semua pihak. Keinginan untuk mewujudkan *good governance* merupakan salah satu agenda pokok reformasi yang diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah daerah. Masyarakat menuntut adanya akuntabilitas yang baik disertai dengan transparansi dan keterbukaan pengelolaan sektor publik supaya masyarakat dapat

turut serta dalam mengontrol dan memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Mahsun menjelaskan ada beberapa kendala dalam mengimplementasikan akuntabilitas dalam sektor publik antara lain agenda atau rencana yang tidak transparansi, favoritism (isu yang licik), kepemimpinan yang lemah, kekurangan sumber daya, *lack of follow-through* (manajemen tidak dapat dipercaya), garis wewenang dan tanggung jawab kurang jelas dan kesalahan penggunaan data (Mahsun, 2018).

Paradigma baru tersebut menyebabkan pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan otonomi seluas-luasnya dan secara proporsional kepada daerah yang diwujudkan dengan adanya pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Darise menjelaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh sumber pendapatan termasuk dana perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrument atau Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan tanggung jawab (Darise, 2009).

Hingga saat ini otonomi daerah memang sudah berjalan di tiap daerah di Indonesia. Dapat dipahami tidak semua daerah mempunyai kesiapan yang sama. Adakalanya pemerintah lebih bergantung pada pemerintah pusat dan kurang memperhatikan dan mengoptimalkan pendapatan daerah. Maka dari itu pelaksanaa (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) APBD juga seringkali bermasalah. Berbicara mengenai APBD, upaya perbaikan pengelolaan keuangan daerah, khususnya perencanaan APBD, masih merupakan agenda strategis bagi percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah (untuk daerah tertentu).

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, laporan keuangan adalah struktur yang mencerminkan posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan umum laporan keuangan adalah untuk kepentingan publik untuk menyajikan informasi tentang kondisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas dalam bentuk yang membantu menginformasikan pengambilan keputusan ekonomi bagi pengguna. Laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan hasil dari suatu proses akuntansi dan digunakan oleh banyak pihak sebagai alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Orang ini adalah seseorang yang mengelola dan memiliki kepentingan keuangan dengan data keuangan instansi.

Berdasarkan dari fenomena yang sudah disampaikan diatas, jelas bahwa prosedur keuangan memiliki peran penting, yaitu untuk mempermudah pekerjaan serta membuat suatu pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan. Permasalahan seperti prosedur pencatatan dan pelaporan keuangan dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan memiliki peran yang amat penting bagi instansi pemerintahan.

## II. Landasan Teori

### Pencatatan dan Pelaporan Keuangan

Sebelum era reformasi keuangan daerah, pengertian pencatatan dalam akuntansi adalah pembukuan, padahal menurut akuntansi pengertian demikian tidaklah tepat. Secara Hal ini disebabkan karena akuntansi menggunakan sistem pencatatan. Menurut Halim (2012, p. 45) terdapat beberapa sistem pencatatan, yaitu *single entry* dan *double entry*. Pembukuan hanya menggunakan sistem pencatatan *single entry* sedangkan akuntansi dapat menggunakan ketiga sistem pencatatan tersebut.

Sistem ini disebut dengan sistem *double entry*. Sistem pencatatan *double entry* inilah sering disebut akuntansi. Menurut Halim menyatakan bahwa menurut sistem pencatatan *double entry* pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Sehingga pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal, dalam pencatatan tersebut ada sisi debit dan sisi kredit dan dalam melakukan pencatatan tersebut setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi (Halim, 2012, p. 36).

Pencatatan adalah proses memasukan data ke dalam media sistem pencatatan data. Jika media sistem pencatatan data tersebut berupa buku, pencatatan data dilakukan dengan menulis pada lembar-lembar buku. Yang termasuk dalam pencatatan data adalah aktivitas penulisan ke buku atau kertas, pemasukan data ke dalam komputer (Witarto, 2008).

Pada umumnya laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen sendiri akan digunakan oleh banyak pihak dan harus disajikan dengan cara dan prosedur tertentu sesuai dengan standar yang berlaku. Oleh karena itu, jika aturan tersebut tidak diikuti, maka penyajian laporan keuangan tidak dapat dilakukan. Pengoperasian sistem akuntansi pencatatan harus mencakup semua aktivitas yang diperlukan untuk menyediakan berbagai informasi bagi manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan serta melaporkan keadaan dan operasi perusahaan atau instansi pemerintahan.

Menurut Munawir (2004, p. 2) mengemukakan bahwa pengertian laporan keuangan adalah Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas dari perusahaan tersebut.

Pelaporan keuangan adalah kegiatan melaporkan informasi keuangan. Informasi yang dilaporkan dalam pelaporan keuangan merupakan entitas keuangan. Tahap pelaporan keuangan dimulai dari identifikasi peristiwa atau transaksi keuangan hingga ke pengungkapan informasi keuangan dan informasi bisnis.

### Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa sistem akuntansi pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Sistem akuntansi pemerintahan merupakan suatu rangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi dan operasi

keuangan pemerintah yang dilakukan baik secara manual maupun komputerisasi. Data akuntansi dalam akuntansi pemerintahan ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, dan juga masyarakat. Sistem akuntansi pemerintahan direncanakan, diorganisasikan, serta dijalankan atas dasar dana.

### **Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu SAP yang diberikan judul, nomor, dan tanggal efektif. Selain itu, SAP juga dilengkapi dengan kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat 3 (tiga) Lampiran yaitu:

1. Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
2. Lampiran II Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual. dan
3. Lampiran III tentang Proses Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

SAP Berbasis Akrual diterapkan dalam lingkungan pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

### **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Masih menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah salah satu terwujudnya pelaksanaan desentralisasi fiskal secara efektif dan efisiensi.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah berikut dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah serangkaian prosedur yang dimulai dari

proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual maupun dengan menggunakan aplikasi komputer. Oleh karena itulah sistem akuntansi menjadi suatu tuntutan sekaligus kebutuhan bagi tiap Pemerintah Daerah.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 (pasal 15 dan 16) dijelaskan bahwa APBD mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Otorisasi
2. Fungsi Perencanaan
3. Fungsi pengawasan
4. Fungsi alokasi
5. Fungsi distribusi
6. Fungsi stabilisasi Proses Penyusunan APBD

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah tidak lagi bertumpu atau mengandalkan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten/Kota saja. Tetapi, dalam peraturan pemerintah dalam negeri itupun disebutkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kini wajib menyusun dan melaporkan posisi keuangannya, yang kemudian dikoordinasi dengan Bagian Keuangan.

### **Akuntansi Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**

Dalam struktur Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Dalam konstruksi keuangan daerah, terdapat dua jenis satuan kerja, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selanjutnya dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah tentang akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 (pasal 241-264) mengatur tentang prosedur akuntansi SKPD, yaitu meliputi serangkaian proses mulai pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan dapat secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Selain itu juga mengatur prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, akuntansi aset, dan akuntansi selain kas. Kegiatan akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, aset dan selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara. Pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan akuntansi SKPD adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan Bendahara di SKPD. PPK-SKPD memiliki tugas

berikut :

1. Mencatat transaksi-transaksi pendapatan, belanja, aset dan selain kas berdasarkan bukti-bukti terkait.
2. Memposting jurnal-jurnal pendapatan, belanja, aset dan selain kas ke dalam buku besarnya masing-masing.
3. Membuat Laporan Keuangan, yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Bendahara di SKPD memiliki tugas menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi SKPD. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Siklus Akuntansi adalah tahap-tahap yang dalam sistem akuntansi, diantaranya sebagai berikut :

1. Analisis Transaksi
2. Jurnal
3. Posting ke Buku Besar
4. Neraca Saldo
5. Jurnal Penyesuaian
6. Neraca Saldo Setelah Penyesuaian
7. Laporan Keuangan:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran
  - b. Neraca
  - c. Laporan Operasional
  - d. Laporan Perubahan Ekuitas
  - e. Catatan Atas Laporan Keuangan
8. Jurnal Penutup.

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan sebuah kegiatan membandingkan penelitian yang sedang dikerjakan penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan peneliti sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian sebelumnya agar dapat melihat kelebihan dan kekurangan pada hasil penelitian yang penulis laksanakan.

1. Penelitian yang berjudul Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Sosial Kabupaten Ende. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami data dan mengolah hasil penelitian berupa pencatatan dan laporan keuangan pada Dinas Sosial tahun 2015.
2. Penelitian yang berjudul Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten. Metodologi penelitian dalam penelitian penulis adalah desain penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami data yang diperoleh berupa catatan dan laporan keuangan. Jenis data yang dipakai adalah data primer dan data

sekunder dan data yang diperoleh, yaitu dengan teknik pengumpulan data riset lapangan dan riset pustaka.

### **III. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian pada Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan yang beralamat di Jl. H.M. Syukur Soritua Harahap No. 38, Padangsidempuan, Sumatera Utara. Metode pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami data dan mengolah hasil penelitian berupa pencatatan dan laporan keuangan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan pada tahun 2022.

Desain penelitian adalah suatu rencana kerja yang terstruktur dan komperhensif mengenai hubungan-hubungan antara variabel-variabel yang disusun sedemikian rupa agar hasil penelitiannya dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian (Kusuma, 2015). Dalam perencanaan tersebut tercakup hal-hal yang akan dilakukan peneliti mulai dari membuat hipotesis dan implikasinya secara operasional samapai pada analisis akhir.

### **IV. Hasil Dan Pembahasan**

#### **Pendapatan**

Pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan yang diterima oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan selama Tahun Anggaran bersangkutan. Karena Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak mengelola penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka tidak ada pencatatan terhadap pendapatan, sehingga tidak ada bendahara penerimaan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan. Transaksi penerimaan kas hanya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu penerimaan kas atas dana yang akan digunakan untuk kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan selama Tahun Anggaran bersangkutan.

#### **Belanja**

Belanja terbagi dari 2 jenis, yaitu:

1. Belanja Operasi
  - a. Belanja pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri.
  - b. Belanja barang merupakan pengeluaran untuk penyediaan barang dan jasa. Dalam belanja pegawai terdapat masalah terkait pencatatan pada buku besar belanja pegawai yang seharusnya dicatat sebesar Rp 1.878.849.154, tetapi dicatat sebesar Rp 1.878.938.674. Hal ini akan mempengaruhi Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

## 2. Belanja Modal

Belanja untuk pengadaan peralatan dan mesin (aset tetap), antara lain adalah komputer, laptop, printer, mesin hitung, meja kerja dan kursi kerja, lemari arsip, meja komputer, dan lain sebagainya.

### Aset

Aset yang dimaksud adalah aset tetap yang dikuasai atau digunakan oleh Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan, yaitu berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan dan Aset Tetap Lainnya.

**Tabel 1. Neraca Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan  
Per 31 Desember 2022 dan 2021**

URAIAN	2022	2021
<b>ASET</b>		
ASET TETAP		
Tanah	196.375.610,00	196.375.610,00
Peralatan dan Mesin	3.046.713.250,00	2.911.302.250,00
Gedung dan Bangunan	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	405.139.000,00	371.200.000,00
Aset Tetap Lainnya	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
Akumulasi Penyusutan	(3.018.426.314,00)	(2.804.691.423,00)
JUMLAH ASET TETAP	629.801.546,00	674.186.437,00

### Jurnal

Dari bukti-bukti transaksi yang ada pada bendahara pengeluaran, maka PPK-BKD melakukan penjurnalan, yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Akuntansi Belanja (Pengeluaran Kas)
2. Akuntansi Aset

### Posting ke Buku Besar

Setelah melakukan pencatatan pada buku jurnal, maka langkah selanjutnya PPK-BKD akan melakukan posting ke buku besar rekening masing-masing. Posting dilakukan secara periodik (bulanan).

### Jurnal Penyesuaian

Jurnal penyesuaian yang dibuat oleh PPK-BKD adalah untuk koreksi kesalahan atas pencatatan yang terjadi dan tidak ada penyesuaian untuk penyusutan aset tetap baik penyusutan untuk Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, maupun untuk aset tetap lainnya. Hal ini karena belum diperhitungkannya nilai penyusutan atas aset tetap tersebut, dan ini sudah dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (Hidayat, Rohaeni, & Nuraeni, 2020).

### Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Setelah melakukan posting ke buku besar terhadap jurnal penyesuaian, maka akan ada beberapa perkiraan yang akan mengalami perubahan dan juga akan ada rekening baru yang muncul. Saldo-saldo perkiraan yang masuk dalam Neraca Saldo setelah Penyesuaian adalah saldo rekening yang sudah disesuaikan. Apabila dalam jurnal penyesuaian muncul rekening baru, maka perkiraan tersebut dimasukkan dalam Neraca Saldo setelah Penyesuaian.

### Laporan Keuangan

Laporan Keuangan yang disusun oleh PPK-Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran Kas

Berdasarkan data penelitian Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidimpuan tahun anggaran 2022 hanya berupa Belanja. Total realisasi belanja untuk tahun 2022 yang seharusnya adalah Rp 6.982.526.014 atau mencapai 93,68% dari total belanja yang dianggarkan pada tahun tersebut yaitu sebesar Rp 7.453.270.294, sehingga terdapat Surplus (Defisit) tahun anggaran 2022 yang seharusnya sebesar Rp 470.744.280. Realisasi belanja tersebut terdiri dari:

- a. Belanja operasi Rp 6.710.691.014 (93,77%)
- b. Belanja modal Rp 271.835.000 (91,62%)

**Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah**  
**Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan**  
**01 Januari 2022 Sampai 31 Desember 2022**

No.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	% 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
5	BELANJA DAERAH	7.453.270.294,00	6.982.526.014,00	93,68
5.1	BELANJA OPERASI	7.156.569.641,00	6.710.691.014,00	93,77
5.2	BELANJA MODAL	296.700.653,00	271.835.000,00	91,62

### Neraca

Berdasarkan data penelitian, Neraca Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidimpuan tahun anggaran 2022 menunjukkan bahwa aset yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidimpuan sebesar Rp 629.801.546; yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 0; Aset Tetap sebesar Rp 629.801.546; dan Aset Lainnya sebesar Rp 0. Sedangkan, kewajiban sebesar Rp 0 dan Ekuitas sebesar Rp 629.801.546.

### Laporan Operasional

Berdasarkan data penelitian, Laporan Operasional tahun 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidimpuan berupa beban, yaitu beban

operasi sebesar Rp 7.007.457.397.

### **Laporan Perubahan Ekuitas**

Berdasarkan data penelitian, Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan sebesar Rp. 629.801.546 (defisit) berupa ekuitas awal sebesar Rp. 662.326.437, Surplus / (Defisit-LO) sebesar Rp 7.007.457.397.

### **Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi tentang ekonomi makro, informasi kebijakan fiskal/keuangan dan pencapaian target kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan.
2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan
3. Kebijakan akuntansi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan
4. Penjelasan pos-pos keuangan.
5. Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.

Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan telah melaksanakan sistem akuntansi dan penyajian pelaporan keuangan SKPD telah sesuai dengan ketentuan yang ada, hal itu dapat dibuktikan dari laporan audit yang dikumpulkan, bahwa laporan keuangan telah bebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang material, serta tidak adanya temuan-temuan kesalahan tentang laporan keuangan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada tahun anggaran 2022.

## **V. Kesimpulan Dan Saran**

### **Kesimpulan**

Setelah melihat data-data laporan keuangan dan keterangan yang diperoleh pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan mengenai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan yang telah diuraikan dan dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Padangsidempuan telah melakukan pencatatan akuntansi keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) meliputi jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup. Laporan keuangan yang dihasilkan meliputi, Laporan Realisasi Anggaran Kas,

Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan di mana format dan uraian perkiraan telah sesuai.

2. Penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 24 Tahun 2016 Tanggal 09 November 2016 tentang Pedoman Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Padangsidempuan, pada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang terkait dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### **Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya sumber daya manusia pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Padangsidempuan yang memiliki spesialisasi dan kemampuan dalam rangka pengelolaan pencatatan dan pelaporan keuangan SKPD. Sumber daya manusia ini dapat diperoleh melalui penerimaan pegawai dengan kualifikasi di bidang akuntansi yang memadai serta mengikuti pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis untuk pegawai (SDM) yang sudah ada.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meneruskan penelitian ini dengan meneliti lebih lanjut kesimpulan yang dihasilkan dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya, yakni dalam program studi akuntansi.

#### **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Amru, Achmad. (2020). Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten. *Jurnal Revenue Jurnal Akutansi*. 01(1), 8-15.
- Chamsentya, Yuliana. (2021). Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Sosial Kabupaten Ende. *Jurnal Riset Ilmu Akutansi*, 2(2). 1-12.
- Darise, N. (2009). *Akutansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks.
- Halim, Abdul. (2007). *Akutansi Sektor Publik: Akutansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- Hidayat, Ardi; Rohaeni, Nani; Nuraeni, Y. S. (2020). Effect Of Capital Structure And Company Size On Firm Value With Profitability As A Moderator Variable In Metal Sector Manufacturing Companies And The Like Listed On The Indonesia Stock Exchange (IDX) Period 2013-2017. *Lektoras*, 2(01), 35-54.
- Kusuma, J. W. (2015). Pengaruh Model Pembelajaran dan Minat Belajar Siswa terhadap Hasil Belajar Matematika. *Jurnal Penelitian Dan Pembelajaran Matematika (JPPM)*, 8(2), 147- 154.
- Mahsun, M. (2018). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFEE.
- Munawir. (2004). *Analisa Laporan Keuangan, Edisi Keempat, Cetakan Ketigabelas*. Yogyakarta : Liberty
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011*

- Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.  
Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013*  
Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI, Jakarta.  
Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005* Tentang  
Pengelolaan Keuangan, Jakarta.  
Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010* Tentang  
Standar Akuntansi Pemerintah, Jakarta.  
Rantung, Veronika. (2013). *Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja*  
*Perangkat Daerah (SKPD) di Dinas Perhubungan Kota Manado*. Jurnal Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado. 1(3), 583-590.  
Witarto. (2008). *Memahami Pencatatan Data*. [http://kuliahapsi.blogspot.com/2008-0901-  
archive.html](http://kuliahapsi.blogspot.com/2008-0901-archive.html). Diakses tanggal 16 april 2023.